

Retorika Krisis: Analisis Pidato Presiden Indonesia dan Korea Selatan pada Tragedi Kanjuruhan dan Itaewon

Kezia Sola Gratia

Program Studi Pascasarjana Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia

kezia.sola@ui.ac.id

ABSTRACT

This study compares the responses of the Indonesian and South Korean presidents to man-made disasters and investigates the presence of shift-blaming in their speeches. Utilizing Rhetorical Analysis (RA) to examine how speeches are constructed to achieve specific objectives, and Critical Discourse Analysis (CDA) to explore historical and social contexts, the study focuses on President Jokowi's speeches following the Kanjuruhan tragedy and President Yoon's speeches after the Itaewon disaster. RA delves into the rhetorical strategies, including invention, disposition, style, and delivery, to analyze how each president uses ethos, logos, and pathos to construct their messages. CDA further examines the discourse of shift-blaming characteristic of autocratic tendencies. The findings reveal differences in how each president addresses responsibility and accountability. While the trace of shift blaming is prominently evident in Jokowi's speeches, Yoon's speeches are characterized by a strong emphasis on image-saving. This comparative analysis provides insights into the distinct communication strategies employed by leaders in response to man-made disasters.

Keywords : crisis communication, comparative analysis, leadership strategies, presidential rhetoric

ABSTRAK

Studi ini membandingkan tanggapan presiden Indonesia dan Korea Selatan terhadap bencana yang disebabkan oleh manusia dan menyelidiki adanya praktik *shift-blaming* dalam pidato mereka. Dengan menggunakan Analisis Retorika (RA) untuk mengkaji bagaimana pidato dikonstruksi untuk mencapai tujuan tertentu, dan Analisis Wacana Kritis (CDA) untuk mengeksplorasi konteks sejarah dan sosial, penelitian ini berfokus pada pidato Presiden Jokowi setelah tragedi Kanjuruhan dan pidato Presiden Yoon setelah bencana Itaewon. RA menggali strategi retorik, termasuk penemuan, disposisi, gaya, dan penyampaian, untuk menganalisis bagaimana setiap presiden menggunakan etos, logo, dan pathos untuk menyusun pesan mereka. CDA mengkaji lebih jauh wacana karakteristik menyalahkan pergeseran dari kecenderungan otokratis. Temuan ini mengungkapkan perbedaan dalam cara masing-masing presiden menangani tanggung jawab dan akuntabilitas. Sementara praktik *shift-blaming* sangat menonjol dalam pidato Jokowi, pidato Yoon dicirikan oleh penekanan yang kuat pada penyelamatan citra (*saving image*). Analisis komparatif ini memberikan wawasan mengenai strategi komunikasi berbeda yang digunakan oleh para pemimpin dalam menanggapi bencana yang disebabkan oleh manusia (*man-made disaster*).

Kata kunci : analisis komparatif, komunikasi krisis, strategi kepemimpinan, retorika presiden.

PENDAHULUAN

Pada bulan Oktober tahun lalu, Indonesia dilanda dukacita yang berasal dari dunia sepak bola. Pada tanggal 1 Oktober 2022, sebanyak 134 orang meninggal dalam tragedi Kanjuruhan (Aminuddin, 2022). Tidak sampai satu bulan setelah kejadian itu, tragedi lain terjadi di Korea Selatan, tepatnya di daerah Itaewon. Tragedi ini merenggut 156 jiwa

karena kesalahan dalam manajemen keramaian di malam *Halloween* pada tanggal 29 Oktober 2022 (Koreatimes, 2022). Kedua tragedi ini sama-sama dikategorikan sebagai bencana ulah manusia atau yang juga disebut *man-made disaster* karena dua kejadian tersebut terjadi atas ulah manusia (Arif, 2022; Ko, 2022). Selain karena sifatnya sebagai *man-made disaster*, kedua kejadian ini sama-sama menarik perhatian dunia karena angka kematian yang tinggi dan berurusan dengan pihak internasional seperti FIFA (pada tragedi Kanjuruhan).

Sebagai pemimpin negara, Jokowi (Presiden Indonesia) dan Yoon Suk-Yeol (Presiden Korea Selatan) harus turun tangan untuk merespon dan menanggapi tragedi yang terjadi di negara masing-masing. Tidak sampai dua puluh empat jam setelah tragedi Kanjuruhan terjadi, Jokowi langsung mengunggah video dukacita dan langkah-langkah yang akan diambil pemerintah untuk menangani tragedi ini. Hal yang sama juga dilakukan oleh Yoon setelah tragedi Itaewon terjadi dengan mengunggah foto teks yang berisikan ungkapan dukacita, penyesalan, pertanggung jawaban atas kejadian dan langkah selanjutnya untuk menangani kerugian yang muncul. Keduanya sama-sama menggunakan platform Instagram untuk mengkomunikasikan rasa dukacita, belasungkawa dan membagikan langkah-langkah yang diambil pemerintah untuk menangani tragedi ini.

Tindakan yang dilakukan oleh Jokowi dan Yoon merupakan salah wujud komunikasi dari seorang pemimpin dalam menghadapi sebuah krisis. Saat mengalami krisis, orang-orang yang terlibat di dalamnya akan mengalami *shock*, bingung, takut, sedih, marah dan cemas (Schneiker, 2020). Oleh karena itu, pemimpin perlu memainkan perannya untuk mengurangi rasa-rasa negatif yang dialami oleh pengikutnya selama *post-crisis*. Penelitian sebelumnya mengatakan bahwa tipe *charismatic leadership* adalah yang paling sesuai dalam menghadapi krisis karena memiliki orientasi kepada kepentingan bersama dan pemulihan (Crayne & Medeiros, 2021). Dengan berkomunikasi melalui pidato yang diunggah dalam bentuk video maupun teks di media sosial, Jokowi dan Yoon dapat menunjukkan perannya sebagai pemimpin negara dalam mengatasi tragedi yang sedang terjadi sekaligus sebagai media untuk menenangkan rakyat negaranya dalam menghadapi tragedi yang sama-sama mencuri perhatian masyarakat internasional ini.

Di sisi lain, para pemimpin dapat menggunakan bencana atau krisis **secara oportunis** untuk menjarah kas negara, atau untuk memberikan bantuan sosial kepada warga yang membutuhkan (Liu & Boin, 2020; Windsor et al., 2014). Penelitian yang dilakukan oleh Liu & Boin (2020) menyatakan bahwa fase *post-crisis* sebagai fase politik yang tegang karena menghadapi banyak resiko (*intensely political phase*) di mana elit politik harus membongkai situasinya untuk meminimalisir efek bencana atau mengeksploitasi kesempatan untuk mendapatkan manfaat politik. Contoh nyata dapat dilihat dari Presiden Trump ketika krisis COVID-19 terjadi. Trump memberikan wacana *Xenophobia* terhadap warga Asia karena menyalahkan China sebagai penyebab utama virus tersebut (Lantz et al., 2023). Para politikus di China juga dinyatakan melakukan *shift-blaming* atau menyalahkan pihak lain dalam penanganan gempa Wenchuan (Liu & Boin, 2020). Beberapa pemimpin *authoritarian* dari China (Mao Tse Tung), Kuba (Fidel Castro), dan Mesir (Hosni Mubarak) juga ternyata melakukan *shift blaming* pada saat periode

pasca krisis (Windsor et al., 2014). Dari ketiga penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa krisis dapat digunakan untuk melakukan *shift-blaming* dan menjadi sarana untuk menyampaikan agenda politiknya. *Shift-blaming* ini termasuk dalam wacana *aristocracy* dan biasa cenderung dimiliki oleh pemimpinyang otoriter.

Dalam pidatonya, Jokowi sama sekali tidak mengutarakan kata 'maaf' dalam pidato yang merespon tragedi Kanjuruhan. Di sisi lain, Yoon tidak hanya mengutarakan permintaan maaf, tapi juga menyatakan bahwa sebagai Presiden, dia memiliki pertanggungjawaban dalam hidup dan keamanan warga negaranya. Berangkat dari perbedaan antara kedua presiden ini, maka muncullah kecurigaan adanya *shift-blaming* dalam komunikasi Jokowi ketika merespon tragedi Kanjuruhan. Akan tetapi, ada kemungkinan Yoon juga memiliki wacana *shift blaming* dalam pidatonya ketika dia menyalahkan beberapa pihak seperti Kementerian Administrasi Publik dalam pidatonya. Praktik *shift blaming* sendiri merupakan ciri-ciri dari sistem pemerintah *authoritarian*.

Dari lingkungan sosialnya sendiri, baik negara Indonesia maupun Korea Selatan punya kecenderungan untuk memiliki wacana *Authoritarian* di dalam sistem pemerintahan. Di Indonesia, pada masa orde baru kita dipimpin oleh pemimpin *Authoritarian* yaitu Soeharto di mana dia menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan dirinya sendiri, keluarga, dan kelompok-kelompok kepentingan tertentu, bahkan digunakan untuk melakukan kekerasan pada warga (Komarudin & Pramuji, 2023; Rakhmani & Saraswati, 2021). Selain itu, di Indonesia juga ditemukan banyak bentuk inovasi *Authoritarian* di mana jejak otoriter untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu namun dalam bentuk yang berbeda yaitu dengan tersebarnya para elit penggerak *authoritarian (drivers of authoritarian)* di kelompok elit kolektif, oposisi, dan bahkan posisi eksekutif (Mietzner, 2020). Selain itu, penelitian dari Aspinall (2013) menyatakan bahwa sistem politik di Indonesia masih menganut *clientelism* di mana partai politik dibentuk karena adanya kepentingan kelompok. Hal ini dapat terlihat dengan proses terbentuknya 'Tim Sukses' saat Pemilihan Umum dan begitu banyaknya partai di Indonesia (Aspinall & Hicken, 2020). Selain *Clientelism*, di Indonesia juga dapat ditemukan *Patronage Democracy* yang merujuk pada demokrasi di mana partai dan kandidat bergantung pada patronase saat memobilisasi pemilih (Berenschot & Aspinall, 2020).

Di sisi lain, Korea Selatan memang lebih berusaha untuk menghilangkan *Clientelism* dan *Patronage Democracy* dengan mengatur sistem politik menjadi dua partai utama yaitu Liberal dan Konservatif (Han, 2021). Ini berbeda dengan Indonesia yang memiliki banyak partai karena ada kelompok kepentingan yang masuk di dalamnya (Aspinall, 2013). Namun, jika dilihat dari sejarahnya, Korea Selatan juga pernah dipimpin oleh presiden otoriter yaitu Park Chung Hee yang memerintah selama 17 tahun hingga dari 1963 hingga 1979 (Yang, 2023). Pada tahun 1970-1980'an *Clientelism* sangat kuat di Korea karena kekuasaan dikuasi oleh *giant corporation* dan elit politik (Han, 2021). Selain itu wacana *Authoritarian* terlihat dari kasus baru yaitu Tragedi Sewol tahun 2014, menjadi satu stimulan untuk membongkar kasus korupsi dan nepotisme yang dilakukan oleh Presiden Park Geun Hye (Chang, 2018). Kasus terbaru juga datang dari ketua Jaksa di Korea Selatan yang melindungi dan menutupi kasus kekerasan sekolah yang dilakukan

oleh anaknya pada tahun 2018 (Shin, 2023). Dari dua kasus terbaru ini, dapat disimpulkan bahwa pemerintah Korea Selatan masih memiliki kecenderungan *Authoritarian* atau melakukan *autocracy*.

Berdasarkan penjabaran di atas, maka penelitian dimulai dengan kecurigaan adanya praktik-praktik yang menguntungkan kedua presiden Indonesia maupun Korea Selatan dalam menghadapi krisis melalui respon mereka dalam pidato, seperti praktik *shift blaming* atau *saving image*. Krisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Tragedi Kanjuruhan yang terjadi pada 1 Oktober 2022 dan Tragedi Itaewon pada 29 Oktober 2022. Kedua krisis ini sama-sama dikategorikan sebagai *Man Made Disaster* atau Bencana Ulah Manusia. Dengan adanya kecenderungan *authoritarian* dalam sistem politik di Indonesia dan Korea Selatan, penelitian ini ingin melihat adakah kecenderungan praktik *saving image* dan *shift-blaming* dalam diri presiden negara demokrasi yang punya jejak pemimpin otoriter.

Berdasarkan penjabaran di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk membandingkan respon Presiden Indonesia dan Korea Selatan dalam menghadapi Man-Made Disaster, khususnya Tragedi Kanjuruhan dan Tragedi Itaewon. Selain itu, penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi apakah terdapat kecenderungan wacana *autocracy* dalam bentuk *shift-blaming* atau wacana *authoritarian* dalam pidato kedua presiden tersebut. Dengan mengkaji komunikasi krisis yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dan Yoon Suk-Yeol, penelitian ini bertujuan untuk memahami lebih dalam bagaimana kedua pemimpin negara demokrasi ini menghadapi krisis besar, serta apakah mereka menunjukkan ciri-ciri kepemimpinan otoriter dalam proses tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggabung dua metode yaitu *Rhetorical Analysis* (RA) untuk menganalisis komunikasi pemimpin dalam pidato dan CDA (*Critical Discourse Analysis*) untuk mengeksplorasi jejak *shift blaming* dan *saving image* dalam merespon krisis melalui pidato. Analisis Retorika digunakan untuk melihat bagaimana pidato dikonstruksi untuk mencapai tujuan tertentu. Penelitian yang dilakukan oleh Sengul (2019) menggunakan Analisis Retorika dengan paradigma kritis untuk meneliti bagaimana pidato Pauline Hanson yang mengandung wacana sayap kanan dalam konteks politik Australia.

Metode kedua adalah melihat adanya kecenderungan atau jejak *autocracy* dalam pidato kedua presiden berdasarkan ciri-ciri seperti *shift-blaming* atau praktik-praktik lainnya. Data dalam penelitian ini adalah teks pidato Jokowi dalam menghadapi Tragedi Kanjuruhan dan Yoon dalam menghadapi Tragedi Itaewon. Terdapat dua teks pidato untuk masing-masing pemimpin yang akan dianalisis. Berikut adalah tabel mengenai teks pidato yang akan menjadi data primer dalam penelitian ini.

Tabel 3.1. Informasi Teks Pidato Jokowi dan Yoon

Isi Teks	Tanggal Pidato	Presiden
Belaksungkawa dan tindakan pemerintah untuk menangani krisis.	2 Oktober 2022	Jokowi

Update dari penanganan tragedi Kanjuruhan	7 Oktober 2022	Jokowi
Belaksungkawa, permintaan maaf, dan tindakan pemerintah untuk menangani krisis.	30 Oktober 2022	Yoon Suk Yeol
Belaksungkawa, permintaan maaf, dan tindakan pemerintah untuk menangani krisis lebih lanjut.	6 November 2022	Yoon Suk Yeol

Untuk mengumpulkan data, penelitian menggunakan teori retorika yang berbasis dalam *The Five Canons of Rhetoric*. Dalam retorika terdapat pembagian prinsip seni persuasi yang ditetapkan oleh ahli retorika kuno atau yang disebut dengan '*The Five Canons of Rhetoric*'. Dalam hal ini yang dimaksud adalah persiapan-persiapan yang perlu dilakukan untuk berretorika dalam pidato (misalnya) yaitu; *Invention* (penemuan), *Disposition* (penyusunan), *Style* (gaya), *Delivery* (penyampaian), dan *Memory* (pengingatan) (Griffin et al., 2019). *Invention* (penemuan) mengacu pada penggalian dan penemuan ide atau gagasan serta penelitian khalayak guna mengetahui metode persuasi yang akan digunakan. *Canon* yang pertama ini mengacu pada Teori Retorika Aristoteles yaitu *Ethos*, *Pathos*, dan *Logos*. *Disposition* (penyusunan) mengacu pada pengorganisasian ide atau gagasan menjadi pesan. *Style* (gaya) mengacu pada pemilihan kata-kata atau bahasa yang tepat. *Delivery* (penyampaian) mengacu pada penyampaian pesan secara lisan oleh pembicara. *Memory* (pengingatan) mengacu pada kemampuan pembicara untuk mengingat apa yang akan disampaikan kepada khalayak.

Data Sekunder dalam penelian ini adalah kajian literasi terhadap berita-berita yang berkaitan dengan Presiden Jokowi, Yoon, dan bagaimana respon mereka terhadap Tragedi Kanjuruhan dan Itaewon. Selain itu, teks pidato kedua presiden lalu juga akan dieksplor untuk mengetahui sejarah dari wacana *autocracy* dan praktik *authoritarian* dalam arena retorika pemimpin.

Dalam proses analisis, studi menggunakan Analisis Komparatif yang membandingkan bagaimana pidato Jokowi dan Yoon dikonstruksi. Dalam menganalisis retorika presiden Jokowi dan Yoon secara kritis, studi ini menggunakan wacana persuasif yang dibangun oleh Winton (2013) yang terdiri dari:

1. *Forensic*: berkaitan dengan sifat dan penyebab kejadian di masa lalu.
2. *Epideitic*: berfokus pada masalah saat ini dan apakah sesuatu atau seseorang pantas disalahkan atau dipuji. Pada saat yang sama, ini digunakan untuk mendefinisikan cara bertindak, berbicara, atau berpikir yang dapat diterima atau tidak dan dieksploitasi dengan tujuan memperkuat komitmen audiens terhadap nilai-nilai yang dipilih dan meningkatkan kecenderungan mereka untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai tersebut. *Deliberative*: berkaitan dengan meyakinkan orang lain untuk melakukan sesuatu dan / atau menerima sudut pandang tertentu.

Ketiga wacana persuasif di atas dapat membantu penelitian untuk melihat strategi retorika apa yang digunakan baik oleh Jokowi maupun Yoon. Ketiga wacana diskursif di

atas dapat membantu untuk melihat adanya apakah ada wacana *power* atau *autocracy* di dalam pidato kedua presiden tersebut.

Setelah menganalisis pidato dengan Analisis Retorika, maka langkah selanjutnya adalah menggunakan DHA untuk melihat faktor sejarah dari wacana *autocracy* atau *authoritarian* dalam teks pidato. Analisis kualitatif sistematis dalam DHA mempertimbangkan empat lapisan konteks (Wodak, 2009):

1. hubungan intertekstual dan interdiskursif antara ucapan, teks, genre dan wacana,
2. variabel sosial/sosiologis ekstralinguistik,
3. sejarah dan arkeologi teks dan organisasi, dan
4. kerangka kelembagaan dari konteks khusus dari suatu situasi.

Dengan cara melakukan cara di atas, maka tulisan ini dapat mengeksplorasi bagaimana wacana, genre, dan teks berubah karena konteks sosial-politik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini akan membagikan hasil dari proses penelitian dalam studi ini dari sisi Analisis Retorika dan Analisis DHA dari Ruth Wodak. Analisis Retorika dengan menggunakan prinsip *Five Canons of Rhetoric* akan membantu memberikan gambaran bagaimana pidato diatur sedemikian rupa untuk menyatakan maksud penyampainya. Analisis Retorika juga dapat membantu untuk mengidentifikasi bagaimana kedua presiden merepon bencana *man-made* dalam kedua pidato mereka. Setelah itu, penelitian ini juga menggunakan CDA untuk melihat bagaimana praktik *shift-blaming* atau *saving image* maupun wacana kritis lain dikonstruksi dalam pidato kedua presiden tersebut. Lalu akan ada tabel yang akan membantu dalam analisis komparasi atau perbandingan dalam kedua proses di atas,

Dalam retorika terdapat pembagian prinsip seni persuasi yang ditetapkan oleh ahli retorika kuno atau yang disebut dengan 'The Five Canons of Rhetoric'. Dalam hal ini yang dimaksud adalah persiapan-persiapan yang perlu dilakukan untuk berretorika dalam pidato (misalnya) yaitu; *Invention* (penemuan), *Arrangement* (penyusunan), *Style* (gaya), *Delivery* (penyampaian), dan *Memory* (pengingatan) (Griffin et al., 2019). *Invention* (penemuan) mengacu pada penggalian dan penemuan ide atau gagasan serta penelitian khalayak guna mengetahui metode persuasi yang akan digunakan. *Arrangement* (penyusunan) mengacu pada pengorganisasian ide atau gagasan menjadi pesan. *Style* (gaya) mengacu pada pemilihan kata-kata atau bahasa yang tepat. *Delivery* (penyampaian) mengacu pada penyampaian pesan secara lisan oleh pembicara. *Memory* (pengingatan) mengacu pada kemampuan pembicara untuk mengingat apa yang akan disampaikan kepada khalayak.

Tidak memilih beberapa *canon* seperti *Memory* karena Jokowi sifatnya pidato yang di *pre-record* atau direkam terlebih dahulu sehingga tidak bisa dilihat apakah dia benar-benar mengingat pidatonya atau tidak. Dengan adanya proses *pre-record*, artinya ada sentuhan pihak eksternal untuk mengkonstruksi kelancaran pembicara saat berpidato. Oleh karena itu, *Canon 4: Memory* tidak dapat digunakan dalam penelitian ini karena

belum tentu memberikan hasil yang sesuai untuk *Canon* ini. Alhasil, penelitian ini akan melihat pidato Yoon dan Jokowi dari 4 persepektif Canon yaitu *Invention*, *Arrangement* atau *Discourse*, *Style*, dan *Delivery*.

Invention

Canon yang pertama ini berangkat dari kerangka Retorika Aristoteles yang terdiri dari *Artistic proofs* yang merujuk bukti internal yang mengandalkan *logos* (logika), *pathos* (emosional), dan *ethos* (etika). *Logos* artinya argumen yang masuk akal. Terdiri dari dua bentuk; *Enthymeme* atau entimem (argumen yang masuk akal) dan *Example* atau contoh (percontohan dari kejadian nyata di masa lalu). *Pathos* adalah bukti yang terdiri dari perasaan dan emosi yang ditimbulkan oleh pidato (Kemarahan vs. Ketenangan, Ketakutan vs. Keberanian, Kekaguman vs. Kecemburuan). *Ethos* artinya kredibilitas sumber (pembicara) yang dirasakan (oleh pendengar). Aristoteles merumuskan tiga hal yang menentukan kredibilitas pembicara; (1) Tingkat kecerdasan, (2) Karakter seseorang (sopan & jujur), (3) Niat baik (Griffin et al., 2018).

Berikut adalah tabel perbandingan antara pidato Jokowi dan Yoon dalam *Canon 1: Invention* dan pembahasan mengenai konsep *Canon* ini beserta dengan rujukan transkrip akan dibagikan di bawah tabel.

Tabel 1. Perbandingan Pidato Yoon dan Jokowi Berdasarkan *Canon 1: Invention*

	Pidato Jokowi untuk Tragedi Kanjuruhan	Pidato Yoon untuk Tragedi Itaewon
<i>Ethos</i>	<ul style="list-style-type: none">Jokowi menggunakan unsur <i>ethos</i> dengan banyak merujuk pada niat baik untuk memperbaiki efek dari tragedi Kanjuruhan.Dalam pidato Jokowi yang kedua, dia banyak merujuk kepada karakter dengan melaporkan apa yang sudah dia lakukan sebagai perwakilan pemerintah dalam menghadapi tragedi Kanjuruhan.	<ul style="list-style-type: none">Yoon juga menggunakan unsur <i>ethos</i> dengan banyak merujuk pada niat baik untuk memperbaiki efek dari tragedi Itaewon.Yoon juga banyak menggunakan kalimat yang meningkatkan kredibilitasnya dengan mempersuasi pendengarnya banyak dia memiliki karakter yang baik (berempati dan bertanggung jawab.)Banyak merujuk pada tingkat kecerdasan untuk meningkatkan kredibilitasnya pada pendengar pidatonya.
<i>Logos</i>	<ul style="list-style-type: none">Dalam unsur Logos, Jokowi menggunakan argumen yang masuk akal (<i>enthymeme</i>)	<ul style="list-style-type: none">Yoon membuka pidato pertamanya dengan unsur Logos yaitu mengungkapkan

	<p>karena dia banyak memberikan perintah terhadap kelompok tertentu dan alasan juga harapan di balik perintah tersebut.</p>	<p>fakta terjadinya tragedi Itaewon.</p> <ul style="list-style-type: none"> Juga banyak menggunakan unsur <i>Enthymeme</i> untuk mempersuasi logika masyarakat seperti dengan memberikan banyak ilmu mengenai manajemen bencana yang mempengaruhi langkah yang akan diambil pemerintah untuk merespon dampak tragedi Itaewon.
<i>Pathos</i>	<ul style="list-style-type: none"> Jokowi membuka pidato dengan kalimat yang bertujuan untuk membangun perasaan sedih atau dukacita pada pendengarnya. Jokowi mengakhiri pidato dengan menggunakan kalimat yang bertujuan untuk membangkitkan perasaan waspada dan mungkin ada unsur kemarahan juga di dalamnya. Dalam pidato yang kedua, Jokowi banyak ingin membangun ketenangan di dalam hati pendengarnya. 	<ul style="list-style-type: none"> Yoon banyak menggunakan unsur <i>pathos</i> untuk menunjukkan dan membangkitkan kesedihan baik di pidato pertama atau kedua, hingga dalam tahap menyatakan permohonan maaf di kedua pidato. Yoon berulang kali mengatakan bahwa dia merasa sedih dan berat hati atas terjadinya Tragedi Itaewon.

Baik Jokowi dan Yoon, keduanya menggunakan untuk *ethos* yang banyak merujuk pada niat baik untuk memperbaiki efek dari tragedi Itaewon. Berikut adalah beberapa contoh kalimat Jokowi dalam pidatonya:

- *Saya telah meminta Menteri Kesehatan dan Gubernur Jawa Timur untuk ...*
- *Saya juga telah perintahkan kepada Menpora, Kapolri, dan Ketua Umum PSSI untuk.*
- *Khusus kepada Kapolri saya minta melakukan investigasi dan mengusut tuntas kasus ini.*
- *Untuk itu, saya juga memerintahkan PSSI untuk..*

Sedangkan dalam pidato Yoon, dia banyak menggunakan unsur *ethos* yang tidak hanya merujuk pada niat baik, tapi juga mempersuasi pendengarnya bahwa dia memiliki karakter yang baik. Dengan menyatakan, "*Sebagai presiden yang bertanggung jawab atas hidup dan keamanan warga negara, saya merasa berat dan sulit untuk menahan kesedihan.*"

memancarkan bahwa Yoon ingin dipakai sebagai presiden yang bertanggung jawab langsung ketika ada masalah

Dalam unsur Logos, Jokowi banyak menggunakan kalimat perintah yang disertai oleh alasan dibalik perintah tersebut dan harapan yang ingin dicapai melalui perintah itu. Ini artinya Jokowi banyak menggunakan unsur *enthymeme* atau alasan yang masuk akal. Berikut adalah contoh-contoh kalimat perintah Jokowi yang mengandung unsur Logos di mana *highlight* hijau menunjukkan alasan mengapa perintah itu dibuat, dan warna biru terang menunjukkan harapan yang ingin dicapai melalui perintah tersebut:

- *Saya telah meminta Menteri Kesehatan dan Gubernur Jawa Timur untuk memonitor khusus layanan medis bagi korban yang sedang dirawat di rumah sakit agar mendapatkan pelayanan terbaik.*
- *Khusus kepada Kapolri saya minta melakukan investigasi dan mengusut tuntas kasus ini. Untuk itu, saya juga memerintahkan PSSI untuk menghentikan sementara Liga 1 sampai evaluasi dan perbaikan prosedurnya pengamanan dilakukan Yoon*

Dalam unsur Pathos, Jokowi dan Yoon sama-sama membuka pidato dengan kalimat yang bertujuan untuk membangun perasaan sedih atau dukacita pada pendengarnya:

Saya menyampaikan dukacita yang mendalam.

Namun dibagian akhir pidato Jokowi menggunakan kalimat yang bertujuan untuk membangkitkan perasaan waspada dan ada kemungkinan unsur kemarahan juga di dalamnya:

Saya menyesalkan terjadinya tragedi ini dan saya berharap ini adalah tragedi terakhir sepak bola di tanah air. Jangan sampai ada lagi tragedi kemanusiaan seperti ini di masa yang akan datang. Sportivitas, rasa kemanusiaan, dan rasa persaudaraan bangsa Indonesia harus terus kita jaga bersama.

Sedangkan Yoon, banyak menggunakan unsur *pathos* terutama untuk membangun kesedihan dan empati di hati pendengarnya. Berikut adalah beberapa kalimat yang dikatakan oleh Yoon dalam pidatonya untuk membangun kesedihan dan empati:

Walaupun saya tidak berani membandingkan perasaan saya dengan orang tua yang kehilangan putra dan putrinya, tetapi sebagai presiden yang harus melindungi kehidupan dan keselamatan rakyat, saya berduka dan berat hati. Saya sungguh-sungguh minta maaf kepada keluarga yang berduka yang menghadapi tragedi yang tidak dapat dikatakan ini dan kepada orang-orang yang berbagi rasa sakit juga kesedihan. Sekali lagi, saya berdoa untuk jiwa para korban dan menyampaikan belasungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan. Saya masih hancur dan gelisah dalam menghadapi bencana yang luar biasa ini, tetapi pemerintah tetap harus mengerahkan seluruh kemampuannya untuk menangani bencana ini dengan penuh tanggung jawab dan menciptakan Negara Republik Korea yang aman agar dapat mencegah tragedi seperti ini terjadi lagi.

Dari penjabaran di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Yoon lebih banyak dan berulang kali membagikan kesedihannya, sedangkan Jokowi tidak terlalu fokus dalam unsur *pathos ini*.

Disposition

Canon yang kedua yaitu *Disposition* atau juga disebut sebagai *Arrangement* dalam beberapa penelitian, merujuk pada pentingnya mengenali pola struktural yang luas seperti kronologis, pemecahan masalah, sebab-akibat, atau pengaturan iklim/lingkungan/konteks (Ruggieri et al., 2023). *Canon* ini berasumsi bahwa mengatur dan mendistribusikan teks dengan urut atau secara teratur (*in order*) adalah inti dalam menyampaikan isi pidato. Oleh karena itu, *Canon* ini akan membantu bagaimana pidato Jokowi dan Yoon diatur untuk menghasilkan efek retorika.

Pertama, untuk pidato Jokowi yang pertama, dia memulai dengan menyampaikan rasa dukacita terhadap korban. Setelah itu, Jokowi lebih banyak menggunakan sistem pemecahan masalah dan sebab-akibat yang dipancarkan dari berbagai perintah untuk pejabat negara yang berurusan dengan tragedi ini seperti Menteri Kesehatan, Gubernur Jawa Timur, Polisi, Menpora, dan Kapolri agar segera merespon efek yang dihasilkan sesuai dengan *jobdesc* masing-masing. Perintah yang diberikan oleh Jokowi kepada pihak-pihak tertentu menunjukkan adanya pemecahan masalah dalam menghadapi tragedi Kanjuruhan. Dia juga menunjuk organisasi PSSI (Persatuan Sepak Bola Indonesia) untuk bertanggung jawab atas tragedi ini dengan melakukan evaluasi dan menghentikan jalannya Liga 1. Unsur sebab-akibat muncul jika ketika Jokowi memberikan alasan dan harapan dari perintah yang dia berikan. Contoh kalimat yang dia katakan adalah, "*Khusus kepada Kapolri saya minta melakukan investigasi dan mengusut tuntas kasus ini. Untuk itu, saya juga memerintahkan PSSI untuk menghentikan sementara Liga 1 sampai evaluasi dan perbaikan prosedurnya pengamanan dilakukan.*"

Pada pidato kedua Jokowi, dia tanpa basa-basi langsung melaporkan progres yang pemerintah sudah lakukan untuk menanggapi tragedi Kanjuruhan. Dia menyatakan bahwa ketua FIFA akan datang ke Indonesia untuk mendiskusikan masa depan dan perkembangan sepak bola di Indonesia. Ini memancarkan bahwa Jokowi ingin menunjukkan progress yang sudah pemerintah lakukan dan berharap adanya transformasi dalam dunia sepak bola Indonesia dengan menyatakan, "*FIFA bersama-sama dengan pemerintah akan membentuk tim transformasi sepak bola Indonesia dan FIFA akan berkantor di Indonesia selama proses-proses tersebut.*" Setelah itu Jokowi kembali lagi membagikan langkah-langkah kolaborasi yang akan dilakukan di masa depan. Dalam pidatonya yang kedua ini, Jokowi lebih banyak menggunakan sistem pemecahan masalah karena isi dari pidato lebih banyak ke arah memperbaiki dunia sepak bola Indonesia.

Untuk pidato Yoon yang pertama, dia membuka dengan fakta terjadinya Tragedi Itaewon, lalu setelah itu baru mengungkapkan rasa dukacitanya kepada keluarga korban. Dari fakta ini, maka dapat disimpulkan bahwa Yoon memulai dengan sistem kronologi yang menceritakan tragedi Itaewon terjadi. Lalu setelah itu, baru dia mengungkapkan dukacitanya. Berikut adalah kalimat yang Yoon ucapkan: "*Tadi malam saat Halloween, di*

tengah kota Seoul terjadi bencana dan tragedi yang seharusnya tidak terjadi. Saya mendoakan jiwa orang-orang yang meninggal akibat kecelakaan yang tak terduga itu dan pemulihan yang cepat bagi korban yang terluka." Inipun juga terjadi di pidato kedua ketika dia menyatakan, "Seminggu telah berlalu sejak tragedi Itaewon terjadi." Ini menunjukkan bagaimana Yoon memulai dengan kronologi kejadian dalam pidatonya.

Setelah itu, baik dalam pidato yang pertama maupun kedua, Yoon mengubah sistem *Canon 2* ini menjadi pemecahan masalah dengan membagikan langkah-langkah ke depan yang akan dilakukan oleh pemerintah. Contoh perintah yang dia berikan adalah:

"Mulai hari ini, pemerintah menetapkan masa berkabung hingga kejadian/tragedi ini settled atau telah dapat dikontrol dan **pemerintah juga menempatkan penanganan insiden ini dan langkah-langkah tindak lanjutnya sebagai prioritas utama urusan negara. Pertama-tama, selain dukungan untuk upacara pemakaman, pemerintah akan melakukan segala upaya untuk segera memberikan bantuan medis kepada yang terluka dengan mengoperasikan semua sistem medis darurat yang tersedia. Pemerintah akan mencocokkan dan menugaskan pejabat publik yang relevan untuk memastikan bahwa tidak ada celah dalam melakukan tindakan dan dukungan yang diperlukan.**

Ini menunjukkan bahwa dalam *Canon 2: Disposition*, Yoon memulai dengan sistem kronologis, lalu melanjutkan dengan sistem pemecahan masalah. Berikut adalah tabel perbandingan pidato Yoon dan Jokowi dalam sisi *Canon 2: Disposition*:

Tabel 2. Perbandingan Pidato Yoon dan Jokowi dari Sisi *Canon 2: Disposition*

	Jokowi	Yoon
Pidato 1	Menggunakan sistem atau <i>arrangement</i> pemecahan masalah yang dilanjutkan dengan sistem sebab-akibat.	Kedua Pidato sama-sama dimulai dengan pengaturan kronologis, lalu dilanjutkan dengan pemecahan masalah dan sebab-akibat.
Pidato 2	Hanya menggunakan pengaturan pemecahan masalah.	

Style

Canon 3: Style ini merujuk pada penyesuaian bahasa yang tepat dengan materi yang disampaikan. *Canon* ini menekankan bahasa yang digunakan oleh pembicara seperti penggunaan kata atau simbol tertentu yang terlihat dalam metafora atau perumpamaan dan bagaimana mereka berkontribusi pada tujuan pembicara sambil menciptakan respons audiens yang diinginkan (Ruggieri et al., 2023). Dalam *Canon* ini tidak banyak yang ditemukan dalam diri Jokowi dan Yoon, namun ada beberapa poin penting yang perlu diperhatikan.

Dalam pidato Jokowi, dia tidak menggunakan metafora atau perumpamaan sama sekali. Ini menunjukkan Jokowi lebih memilih untuk menggunakan *direct communication*. Tidak ada pola bahasa tertentu yang Jokowi gunakan dalam pidatonya, kata 'saya sudah perintahkan' dan kata 'sudah' berulang-ulang kali diucapkan. Sedangkan dalam pidato Yoon, dia banyak menggunakan kata 'saya' ketika menunjukkan penyesalan dan pertanggungjawaban seperti dalam kalimat di bawah ini :

- *Saya menyampaikan belasungkawa yang mendalam bagi keluarga yang mengalami kehilangan.*
- *Sebagai presiden yang bertanggung jawab atas hidup dan keamanan warga negara, saya merasa berat dan sulit untuk menahan kesedihan.*

Namun ketika menyampaikan tentang langkah-langkah ke depan, dia mengganti kata “saya” menjadi “pemerintah”, contoh kalimat di bawah ini:

- *Pemerintah akan melakukan segala upaya untuk segera memberikan bantuan medis kepada yang terluka dengan mengoperasikan semua sistem medis darurat yang tersedia.*
- *Pemerintah akan mencocokkan dan menugaskan pejabat publik yang relevan untuk memastikan bahwa tidak ada celah dalam melakukan tindakan dan dukungan yang diperlukan.*
- *Saya akan bertanggung jawab dan mengurusnya.*

Kesamaan dari kedua presiden ini adalah sama-sama tidak menggunakan metafora atau perumpamaan dalam pidatonya. Jadi, gaya komunikasi Yoon dapat dikatakan sebagai *direct communication*, walaupun tidak se-*direct* Jokowi.

Delivery

Canon yang terakhir ini mengacu pada cara penyampaian pembicara atau *speaker* dalam menyampaikan pidatonya. *Canon* ini juga merujuk kepada kontrol suara dan tubuh dengan cara yang sesuai dengan topik yang akan dibicarakan dan juga gaya komunikasi pembicaranya. Berbicara di depan audiens membutuhkan kompetensi dalam fase-fase yang telah disebutkan sebelumnya, namun ada aspek penting lainnya yang perlu diingat seperti *gesture*, kontak mata, dan intonasi (Ruggieri et al., 2023). *Canon* ini sebetulnya berhubungan dengan *Canon: Memory* yang ditiadakan dalam penelitian ini, sebagai pengiriman menganalisis bagaimana pembicara melakukan pidato melalui suara dan gerakan (Fried & Lundberg, 2021).

Tidak banyak juga yang ditemukan dalam *canon* ini, namun ada beberapa hal yang memang perlu untuk diperhatikan. Jokowi lebih *to-the-point* atau tidak basa-basi, namun tidak menggunakan *gesture* yang banyak. Intonasi atau volume suara yang dia keluarkan akan meningkat jika ingin menekankan sesuatu. Di sisi lain, Yoon berbicara dengan tempo yang lebih lama. Dia juga banyak menggunakan *gesture*, kontak mata pada pendengarnya, juga intonasi dan volume suara yang lebih besar ketika ingin menekankan sesuatu.

Analisis Kritis terhadap Kedua Pidato

Penelitian ini menggunakan paradigma kritis melihat adanya kecenderungan praktik *shift-blaming* yang termasuk dalam wacana autokrasi dalam pidato Presiden Jokowi dan Presiden Yoon dalam merespon bencana ulah manusia atau *man-made disaster*. Wacana autokrasi rupanya banyak berkembang dan justru dapat terlihat ketika krisis terjadi. Ini dapat terjadi karena krisis akan menguji fokus dan kemampuan pemimpin saat berada di bawah tekanan (Guasti, 2020). Krisis juga dapat menunjukkan karakter pemimpin yang sebenarnya dan agendanya jika dia menggunakan krisis sebagai

kesempatan untuk mencapai suatu tujuan. DHA milik Ruth Wodak digunakan untuk melihat perjalanan sejarah praktik autokrasi dalam pidato pemimpin baik di Indonesia maupun Korea Selatan saat menghadapi krisis bencana ulah manusia.

Penelitian ini menemukan bahwa dalam pidato Jokowi, ada beberapa kalimat yang mengarahkan bahwa dia memiliki kecenderungan untuk *shifting blame* seperti tidak ada kata 'maaf' sama sekali dalam pidato Jokowi, berbeda dengan Yoon yang berkali-kali menyatakan maaf dan penyesalan atas tragedy yang terjadi di negaranya. Jokowi juga banyak menunjuk pihak-pihak untuk bertanggung jawab atas tragedy tersebut (Polri, Menpora, dan PSSI) khususnya memberikan perintah pada PSSI untuk memberhentikan Liga 1. Jokowi menyatakan bahwa tragedi Kanjuruhan adalah tanggung jawab beberapa pihak dengan menginstruksikan Kapolri untuk melakukan investigasi dan menyebutkan perlunya evaluasi oleh Menpora, Kapolri, dan Ketua Umum PSSI. Ini bisa dianggap sebagai bentuk shift blaming, di mana sebagian tanggung jawab atas tragedi tersebut dialihkan kepada pihak-pihak tersebut. Selain itu, perintah untuk menghentikan sementara Liga 1 sampai evaluasi dan perbaikan dilakukan juga menekankan bahwa kesalahan tidak hanya pada satu pihak, tetapi memerlukan peninjauan dari berbagai aspek yang mungkin melibatkan berbagai pihak yang berbeda.

Dalam pidato kedua, Jokowi menyampaikan bahwa FIFA tidak memberikan sanksi kepada Indonesia, yang bisa diartikan sebagai upaya untuk meredam kritik internasional dan menunjukkan bahwa tidak semua kesalahan berada di pihak Indonesia. Jokowi juga menekankan langkah-langkah kolaborasi dengan FIFA dan AFC serta berbagai pihak lain untuk memperbaiki situasi, yang bisa dilihat sebagai upaya untuk menunjukkan bahwa tanggung jawab tidak hanya di tangan pemerintah Indonesia saja, tetapi merupakan tanggung jawab bersama.

Dilihat dari sejarahnya, memang Jokowi tidak pernah menyatakan 'maaf' ketika ada tragedi dari bencana ulah manusia. Ketika lion air dan adam air jatuh, Jokowi tidak menyatakan permintaan maaf ([youtube.com](https://www.youtube.com)). Selain itu, dia juga menyatakan akan memerintah pihak-pihak yang berkaitan dengan tragedi yang terjadi sebagai langkah-langkah ke depan, seperti meminta Basarnas untuk mempercepat respon dalam menghadapi bencana.

Secara keseluruhan, pidato-pidato Presiden Jokowi menunjukkan kecenderungan untuk melakukan shift blaming dengan melibatkan berbagai pihak dalam tanggung jawab atas tragedi tersebut. Selain itu, terdapat upaya kuat untuk saving image dengan menunjukkan respons cepat, kerja sama internasional, dan komitmen terhadap perbaikan di masa depan.

Meskipun pidato Presiden Jokowi menunjukkan kecenderungan untuk melakukan shift blaming, hal ini tidak serta-merta berarti bahwa ia benar-benar melakukan hal tersebut. Ada kemungkinan bahwa sebagai presiden, dia memang tidak bersalah dan pihak-pihak yang disebutkannya memang bertanggung jawab. Berbeda dengan pidato Presiden Yoon yang menyertakan permintaan maaf atas kejadian tersebut, Jokowi tidak menyampaikan permintaan maaf. Namun, ini tidak menunjukkan bahwa respon Jokowi lebih baik daripada Yoon. Ketidakhadiran permintaan maaf dari Jokowi dapat menjadi

indikasi adanya kecenderungan shift blaming, namun hal ini juga bisa diartikan bahwa ia sungguh percaya bahwa kesalahan terletak pada pihak lain.

Di sisi lain, dalam pidato Yoon, beberapa temuan menunjukkan bahwa dia memiliki kecenderungan untuk *saving image* seperti dua kali mengutarakan permintaan maaf terhadap keluarga korban sambil membungkuk, berkali-kali mengutarakan kesedihan yang dia rasakan karena tragedi ini, berkali-kali menerangkan bahwa dia adalah presiden yang bertanggung jawab dengan menggunakan kata 'saya' dalam pidatonya ketika sedang mengutarangkan rasa tanggung jawabnya.

Yoon mengekspresikan belasungkawa yang mendalam dan menyatakan kesedihan yang berat, menunjukkan empati yang kuat dan menjaga citra sebagai pemimpin yang peduli. Dia juga menyatakan bahwa pemerintah akan menempatkan penanganan insiden dan langkah-langkah tindak lanjut sebagai prioritas utama menunjukkan respons cepat dan komitmen serius dalam menangani krisis ini. Dia juga menyebutkan bahwa pemerintah akan memastikan tidak ada celah dalam tindakan dan dukungan yang diperlukan untuk korban merupakan upaya untuk menunjukkan kompetensi dan efisiensi pemerintah dalam situasi krisis. Dia juga sangat menekankan bahwa pemerintah akan memastikan proses pencarian fakta diungkapkan secara transparan dan tanpa ragu-ragu menunjukkan komitmen terhadap keterbukaan dan keadilan, yang bertujuan untuk menjaga dan memulihkan kepercayaan publik.

Yoon menjelaskan bahwa pemerintah akan melakukan upaya lebih lanjut untuk menciptakan Korea yang aman dan memastikan rakyat dapat kembali ke kehidupan sehari-hari menunjukkan komitmen terhadap perbaikan dan pemulihan, yang merupakan bagian dari upaya *saving image*. Dia juga menyampaikan permintaan maaf yang tulus kepada keluarga korban dan masyarakat, serta menegaskan bahwa ia bertanggung jawab atas situasi ini, menunjukkan upaya untuk memperbaiki citra pribadi dan pemerintahan di mata publik.

Dalam sejarahnya, presiden Korea Selatan memang selalu minta maaf jika ada krisis bencana ulah manusia. Ini juga yang dilakukan oleh Park Geun Hye saat tragedi tenggelamnya kapal Sewol terjadi pada tanggal 16 April 2014. Park Geun Hye juga berkali-kali menyatakan kesedihan dan rasa tanggung jawab sebagai presiden. Frekuensi Yoon dan Park dalam menyatakan kesedihan dan rasa tanggung jawab memang banyak diulang berkali-kali.

Secara keseluruhan, pidato-pidato Presiden Yoon Seok-Yeol menunjukkan kecenderungan untuk melakukan shift blaming dengan menempatkan sebagian tanggung jawab pada institusi dan kementerian terkait, serta menyatakan bahwa individu yang bersalah akan dimintai pertanggungjawaban. Di sisi lain, dalam pidato Yoon, terdapat upaya yang kuat untuk *saving image* melalui ekspresi empati, permintaan maaf, komitmen terhadap transparansi, dan penekanan pada tindakan-tindakan konkret yang akan diambil untuk mencegah terulangnya tragedi serupa di masa mendatang.

KESIMPULAN

Pada bulan Oktober 2022 telah terjadi dua tragedi besar yang menewaskan lebih dari 100 korban jiwa di Indonesia dan Korea Selatan yang dinamakan Tragedi Kanjuruhan dan Tragedi Itaewon. Tragedi ini tentu mendorong Jokowi dan Yoon Suk Yeol, sebagai presiden dan representatif dari pemerintah juga bangsa Indonesia dan Korea Selatan untuk segera turun tangan menghadapi krisis ini. Semenjak tragedi ini terjadi, kedua presiden ini memberikan dua respon yang sama yaitu menyampaikan belasungkawa dan apa yang sudah juga akan dilakukan ke depan sebagai usaha menghadapi krisis ini.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menggunakan paradigma kritis dan metode analisis teks yang menggabungkan Analisa Retorika dan CDA untuk menganalisis dua video yang diunggah di akun Instagram Jokowi dan dua teks pidato yang diunggah di akun Instagram Yoon Suk-Yeol. Penelitian juga menggunakan teori substantif yang berkaitan dengan Komunikasi Pemimpin di Saat Krisis dan Praktik Autokrasi juga Authoritarian di dalamnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik *shift-blaming* yang termasuk dalam wacana aristokrasi baik dalam Jokowi maupun Yoon tidak terlihat begitu jelas. Ada kemungkinan bahwa Jokowi memiliki kecenderungan untuk melakukan *shift-blaming* karena tidak ada kata maaf dalam pidatonya dan ada unsur-unsur menyalahkan beberapa pihak seperti PSSI dalam pidatonya. Yoon juga memiliki kemungkinan memiliki kecenderungan untuk *Saving Image* atau lebih tepatnya *virtue signaling* dimana dia ingin mendapatkan kredit melalui pidatonya. Secara retorika, kedua presiden ini juga memiliki style yang berbeda, misalnya Jokowi yang dinilai lebih *direct* daripada Yoon dalam menyampaikan pidato.

Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu tidak melihat wacana kekuasaan lain yang kemungkinan ada dalam pidato presiden. Penelitian ini hanya fokus melihat pidato berdasarkan *Five Canons of Rhetoric* dan praktik aristokrasi. Oleh karena itu, penelitian ke depan diharapkan dapat mendalami wacana kekuasaan lain yang mungkin muncul dalam pidato presiden ketika menghadapi krisis.

Secara akademis, penelitian ini memperkaya studi retorika pemimpin khususnya dalam konteks krisis. Penelitian ini juga memperkaya studi komunikasi dalam konteks bencana ulah manusia, yang memiliki karakter berbeda dengan bencana alam. Studi ini juga memperkaya penelitian yang menggunakan metode DHA milik Ruth Wodak yang berkaitan dengan komunikasi pemimpin. Studi tentang praktik aristokrasi dalam pemimpin negara juga akan diperkaya melalui penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminuddin, M. (2022, October). Update Terbaru Korban Tragedi Kanjuruhan 21 Oktober 2022: 794 orang. *Detik.Com*.
- Arif, A. (2022). Kanjuruhan, Bencana Ulah Manusia. *Kompas*.
- Aspinall, E. (2013). A NATION IN FRAGMENTS: Patronage and Neoliberalism in Contemporary Indonesia. *Critical Asian Studies*, 45(1), 27–54. <https://doi.org/10.1080/14672715.2013.758820>

- Aspinall, E., & Hicken, A. (2020). Guns for hire and enduring machines: clientelism beyond parties in Indonesia and the Philippines. *Democratization*, 27(1), 137–156. <https://doi.org/10.1080/13510347.2019.1590816>
- Berenschot, W., & Aspinall, E. (2020). How clientelism varies: comparing patronage democracies. *Democratization*, 27(1), 1–19. <https://doi.org/10.1080/13510347.2019.1645129>
- Chang, P. Y. (2018). Candlelight Protests in South Korea: The Legacies of Authoritarianism and Democratization. *Ewha Journal of Social Sciences*, 34(1), 5–18. <https://doi.org/10.16935/ejss.2018.34.1.001>
- Crayne, M. P., & Medeiros, K. E. (2021). *Making Sense of Crisis: Charismatic, Ideological, and Pragmatic Leadership in Response to COVID-19*. 76(3), 462–474.
- Fried, H., & Lundberg, N. (2021). *A case study of student and teacher perspectives on the five canons of rhetoric*.
- Griffin, E., Ledbetter, A., & Sparks, G. (2018). *A First Look at Communication Theory* (10th ed.). McGraw-Hill Education.
- Guasti, P. (2020). The impact of the covid-19 pandemic in central and eastern europe the rise of autocracy and democratic resilience. *Democratic Theory*, 7(2), 47–60. <https://doi.org/10.3167/DT.2020.070207>
- Han, J. H. (2021). How does party organisation develop beyond clientelism in new democracies? Evidence from South Korea, 1992–2016. *Contemporary Politics*, 27(2), 225–245. <https://doi.org/10.1080/13569775.2020.1862444>
- Ko, D.-H. (2022, October). How Itaewon turned into epicenter of tragedy. *Korea Times*.
- Komarudin, U., & Pramuji, P. (2023). BETWEEN CLIENTELISM AND PATRIMONIALISM: LOCAL POLITICS OF THE PHILIPPINES AND INDONESIA. *JWP (Jurnal Wacana Politik)*, 8(1), 32. <https://doi.org/10.24198/jwp.v8i1.42602>
- Koreatimes. (2022, November). Itaewon crowd crush death toll rises to 156. *Korea Times*.
- Lantz, B., Wenger, M. R., & Mills, J. M. (2023). Fear, Political Legitimization, and Racism: Examining Anti-Asian Xenophobia During the COVID-19 Pandemic. *Race and Justice*, 13(1), 80–104. <https://doi.org/10.1177/21533687221125817>
- Liu, Y., & Boin, A. (2020). Framing a mega-disaster: Political rhetoric and the Wenchuan earthquake. *Safety Science*, 125(December 2019), 104621. <https://doi.org/10.1016/j.ssci.2020.104621>
- Mietzner, M. (2020). Authoritarian innovations in Indonesia: electoral narrowing, identity politics and executive illiberalism. *Democratization*, 27(6), 1021–1036. <https://doi.org/10.1080/13510347.2019.1704266>
- Rakhmani, I., & Saraswati, M. S. (2021). Authoritarian Populism in Indonesia: The Role of the Political Campaign Industry in Engineering Consent and Coercion. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 40(3), 436–460. <https://doi.org/10.1177/18681034211027885>
- Ruggieri, J., Ruggieri, J., & Virginia, W. (2023). *A Neo-Aristotelian criticism of Trump 's " Save America Speech " utilizing the five canons of rhetoric rhetoric Journalism*.
- Schneiker, A. (2020). Populist Leadership: The Superhero Donald Trump as Savior in

Dawatuna: Journal of Communication and Islamic Broadcasting

Volume 4 Nomor 4 (2024) 1667 - 1683 E-ISSN 2798-6683 P-ISSN 2798-690X

DOI: 10.47467/dawatuna.v4i4.3069

- Times of Crisis. *Political Studies*, 68(4), 857–874.
<https://doi.org/10.1177/0032321720916604>
- Sengul, K. (2019). Critical discourse analysis in political communication research: a case study of right-wing populist discourse in Australia. *Communication Research and Practice*, 5(4), 376–392. <https://doi.org/10.1080/22041451.2019.1695082>
- Shin, J.-H. (2023). Yoon vows to combat school violence amid bullying case fallout. *Korea Herald*.
- Windsor, L. C., Dowell, N., & Graesser, A. (2014). The Language of Autocrats: Leaders' Language in Natural Disaster Crises. *Risk, Hazards & Crisis in Public Policy*, 5(4), 446–467. <https://doi.org/10.1002/rhc3.12068>
- Winton, S. (2013). *Rhetorical analysis in critical policy research*. 8398. <https://doi.org/10.1080/09518398.2012.666288>
- Wodak, R. (2009). The Semiotics of Racism: A Critical Discourse-Historical Analysis. In J. Renkema (Ed.), *Discourse, of Course: An Overview of Research in Discourse Studies*. John Benjamins Publishing Company.
- Yang, S. (2023). Kim Chae-gyu syndrome: South Korean politics and divergent filmic portrayals of the assassination of Park Chung Hee. *International Journal of Asian Studies*, 1–16. <https://doi.org/10.1017/S1479591422000511>